

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha peternakan sapi perah rakyat di Provinsi Sumatera Barat belum berdaya saing. Terdapat banyak permasalahan yang dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah, mulai dari permasalahan produksi, pemasaran, manajemen pemeliharaan, penanganan penyakit serta pasca panen. Peternak sapi perah memberikan penilaian tinggi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing untuk variabel produksi, struktur pasar, perilaku dalam memproduksi dan kebijakan pemerintah. Variabel utama yang harus ditingkatkan adalah kinerja usaha peternakan sapi perah, variabel ini mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap daya saing usaha peternakan sapi perah. Untuk meningkatkan kinerja usaha maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Peningkatan kolaborasi antara peternak dengan pihak terkait sangat diperlukan. Dengan demikian peternak perlu mengelola produksi dengan baik, membangun kerjasama yang efektif, dan meningkatkan volume produksi serta kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan usaha mereka.

Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa indikator yang menentukan produksi susu sapi perah adalah kualitas bibit, jumlah sapi laktasi, ketersediaan pakan, frekuensi pemberian pakan dan keberhasilan IB. Diantara indikator tersebut yang menentukan jumlah produksi menurut penilaian peternak adalah kualitas bibit dan keberhasilan Inseminasi Buatan (IB). Kemudian perlu adanya kebijakan pihak pemerintah dalam hal standarisasi harga jual produk, penyediaan subsidi dan program serta kegiatan yang mendukung pengembangan usaha peternakan sapi perah. Diperlukan juga pembinaan secara rutin kepada peternak baik mengenai manajemen reproduksi, manajemen pakan, pemeliharaan dan pasca panen.

Temuan penelitian adalah pengaruh perilaku peternak terhadap daya saing adalah positif dan tidak signifikan. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing usaha bukan menjadi perhatian peternak dalam menjalankan usahanya. Penyebabnya adalah karena usaha peternakan sapi perah merupakan usaha sampingan dari sebagian besar peternak dan jumlah kepemilikan ternak juga kecil,

sehingga usaha peternakan sapi perah ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan utama mereka. Berikutnya dari penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa pengaruh struktur pasar terhadap kinerja usaha negatif dan signifikan. Begitu juga pengaruh kebijakan terhadap struktur pasar. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa peternak tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetisi di pasar susu sapi perah, karena mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Pasar dikuasai oleh perusahaan besar dan pelaku atau lembaga – lembaga pemasaran. Kebijakan pemerintah yang ada belum mampu merubah hal tersebut sehingga perlu dievaluasi kembali.

Berdasarkan temuan penelitian ini maka bangun sebuah rancangan model Pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat dalam bentuk model kluster inovasi yang bernama Model Kluster Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat (KLUSPERA) berbasis Inovasi. Model ini akan memperkuat kerjasama antar peternak dalam kelompok peternak, antara peternak dengan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai penyedia sarana dan prasarana, serta dengan unit pengolahan susu. Selain itu, pendirian lembaga keuangan mikro seperti perusahaan modal ventura juga diperlukan sebagai sumber dana untuk pengembangan usaha. Peran perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi budidaya dan pengolahan juga menjadi penting. Kerjasama antara peternak dengan pemasok bahan baku dan peralatan, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga pendukung lainnya merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan usaha peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan daya saing usaha tersebut.

Dengan demikian pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk produksi, manajemen, pemasaran, dan kerjasama antar stakeholder. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, serta kerjasama antar peternak dan pihak terkait lainnya akan membantu meningkatkan kinerja usaha, daya saing, dan keberhasilan usaha peternakan sapi perah rakyat di Provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan perlu penelitian selanjutnya tentang:

1. Analisa daya saing dengan menggunakan variabel selain dari variabel yang telah diidentifikasi pada penelitian ini.
2. Pengujian implementasi model kluster inovasi usaha peternakan sapi perah rakyat pada peternak di Sumatera Barat
3. Penentuan lembaga keuangan yang tepat yang dapat mendukung kegiatan usaha peternakan rakyat di Sumatera Barat.
4. Pemasaran susu, pemetaan potensi pasar, tren pasar, dan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif dan efektif.
5. Nilai tukar peternak, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha.
6. Motivasi dan kompetensi wirausaha dari peternak sebagai pelaku usaha
7. Analisa keberlanjutan dalam usaha peternakan sapi perah rakyat.
8. Analisis komparatif antara usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lain atau negara lain yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi dalam sektor ini. Ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan daya saing antar wilayah.

C. Implikasi

1. Implikasi Manajerial

- a. Perlu memperhatikan dan meningkatkan manajemen produksi dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Hal ini meliputi pengelolaan reproduksi yang baik, pemilihan bibit unggul, manajemen pakan yang efisien, manajemen kesehatan ternak, dan pemantauan kualitas susu serta manajemen keuangan.
- b. Perbaiki manajemen pemasaran yang efektif melalui inovasi produk, perbaikan kemasan produk, perluasan wilayah pemasaran, dan promosi.
- c. Perlu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peternak yang lebih baik dalam mengelola usaha peternakan sapi perah. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, partisipasi

dalam program binaan, dan pertukaran pengetahuan antar peternak serta melakukan studi banding ke usaha peternakan sapi perah yang lebih maju.

2. Implikasi Kebijakan

- a. Perlu kebijakan pemerintah untuk peningkatan kapasitas produksi berupa bantuan ataupun informasi dan fasilitas akses pengadaan bibit sapi perah, dan sarana produksi
- b. Perlu kebijakan pemerintah berkaitan dengan jaminan penyediaan pakan secara kontinu dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) Sapronak ditingkat kecamatan
- c. Perlunya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendirian unit pengolahan susu (UPS) di masing-masing kluster usaha peternakan sapi perah rakyat untuk menjamin pasar susu yang dihasilkan oleh peternak
- d. Perlu kebijakan pemerintah untuk pendirian lembaga keuangan micro yang dapat mensupport kebutuhan pendanaan usaha peternakan sapi perah rakyat di Provinsi Sumatera Barat.
- e. Perlu kebijakan pemerintah yang tegas mengenai harga input produksi dan output.
- f. Monitoring dan evaluasi yang rutin, meliputi pemantauan kinerja produksi, pemantauan kualitas susu, dan pemantauan pasar

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dihadapkan pada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan implikasi temuan. Pertama-tama, keterbatasan data menjadi kendala utama, dimana ketersediaan data sekunder dan data primer terbatas dapat membatasi kedalaman analisis. Data yang lebih lengkap dan representatif mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikumpulkan atau sumber daya tambahan yang mungkin tidak tersedia.

Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun telah dilakukan analisis terhadap variabel struktur pasar, perilaku, kinerja, dan kebijakan, masih ada aspek-aspek lainnya yang mungkin memiliki kontribusi signifikan terhadap daya saing usaha

peternakan rakyat, dan penelitian ini belum sepenuhnya menggali dimensi-dimensi tersebut.

Keterbatasan dalam ketersediaan data dari wilayah atau negara lain yang memungkinkan analisis komparatif dapat membatasi pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan daya saing antar wilayah. Semua keterbatasan tersebut perlu diakui secara transparan untuk memastikan interpretasi yang objektif dan kehati-hatian dalam membuat rekomendasi kebijakan. Penelitian mendatang dapat mengatasi keterbatasan ini dengan merancang metode yang lebih komprehensif, memperluas cakupan data, dan melibatkan pemangku kepentingan secara lebih efektif.

